

OPINI TOKOH MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN SEBAGAI CENTER POINT OF INDONESIA (CPI)

Kamaruddin, Hafied Cangara, Muh. Akbar

Program Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin

Abstract

The Association of Indonesian Municipalities (APEKSI) which is formed in 2000 aimed to bridge the interests and needs of the city level. The association acts as a unifying, facilitation, mediation and city governments in managing and organizing their governance. This study aims to understand the perspective of the organization APEKSI in communication, both in the review of information systems and communication networks. This type of research is qualitative. The results showed that the system uses the information in APEKSI most mobile and sms, but not so with the use of social media. APEKSI communication network in such activities seminars, workshops, technical assistance, and other activities ensure the sustainability of APEKSI. It can be concluded that membership in APEKSI have followed the dynamics of the development of information technology and structured communications networks.

Keywords : System, Information, Communication, Apeksi

Abstrak

Pembangunan megaprojek *Center Point Of Indonesia (CPI)* tidak lepas dari sebuah masalah dan kritikan, mulai dari anggaran yang besar hingga pembebasan lahan yang kerap kali menjadi masalah utama, bahkan ada yang menganggap sebagai komoditas politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui opini tokoh masyarakat terhadap kebijakan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam membangun *Centre Point of Indonesia (CPI)*, dan untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam membangun *Centre Point of Indonesia (CPI)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CPI merupakan suatu *issue* yang menyangkut kepentingan umum dengan demikian memunculkan berbagai opini masyarakat sehingga mega proyek ini tidak lepas dari pro kontra mengenai dampaknya terhadap ekonomi dan lingkungan. Kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam membangun *Centre Point of Indonesia (CPI)* menunjukkan bahwa konsepsi *Center Point Of Indonesia* berawal dari satu keinginan bagaimana memulai dan menciptakan satu peradaban baru yang tidak hanya bermanfaat untuk masa sekarang tetapi juga untuk kemaslahatan dan kesejahteraan generasi mendatang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Center Point of Indonesia (CPI)* merupakan megaprojek yang mendapatkan perhatian dari tokoh masyarakat dengan menuai pro dan kontra.

Kata Kunci : Kebijakan, pemuka pendapat, publik.

PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan tantangan perkembangan global (Tap. MPR No. IV/MPR/1999).

Dalam mengimplementasikan pembangunan nasional senantiasa mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, serta kokoh, baik kekuatan moral maupun etika bangsa Indonesia.

Hal ini sesuai dengan tujuan nasional, sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,

yaitu : Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pernyataan di atas merupakan cerminan bahwa pada dasarnya tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia yang sejahtera.

Dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan tersebut, maka konsekwensinya pembangunan daerah sebagai integritas pembangunan nasional mutlak harus dilaksanakan berdasarkan rencana yang ditetapkan, baik dalam bentuk rencana jangka pendek maupun jangka panjang. Meskipun dalam pelaksanaan pembangunan tersebut hanya dapat tercapai bilamana terjalin hubungan kerjasama yang baik antara semua komponen pelaksana pembangunan di daerah, terutama hubungan kerja sama antara pihak legislatif dan eksekutif.

Perubahan paradigma pemerintahan saat ini yang ditandai dengan lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dimana pemerintah pusat mencoba meletakkan kembali arti penting otonomi daerah pada posisi yang sebenarnya, yaitu bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan daerah tersebut mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain.

Maka dengan diberlakukannya otonomi

daerah tersebut di satu sisi merupakan peluang yang harus dimanfaatkan oleh daerah dalam memajukan pembangunan wilayahnya dan di sisi lain merupakan tantangan bagi unsur-unsur pelaksana pemerintahan dan pembangunan di daerah, di mana titik sentral dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah terletak pada kemampuan sumberdaya manusia unsur-unsur pelaksana pemerintahan dan pembangunan yang ada di daerah. Salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan dan pemerintahan dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah adalah meningkatkan kemampuan profesionalisme sumberdaya manusia dan kinerja lembaga.

Berangkat dari itu Indonesia merupakan anggota G-20 yang merupakan kelompok 19 negara dengan perekonomian besar di dunia ditambah dengan Uni Eropa. Indonesia juga merupakan salah satu negara besar di dunia dengan jumlah penduduk yang besar dan kekayaan alam melimpah. Walau didera krisis ekonomi, Indonesia mulai bangkit. Kini pembangunan di Indonesia tidak kalah dengan negara-negara lain. Indonesia bahkan memiliki mega proyek kelas dunia. Beberapa mega proyek yang sudah jadi adalah jembatan Suramadu dan wahana permainan di dalam ruangan terbesar di dunia, Trans Studio dan beberapa proyek akan menyusul. Ada yang masih dalam perencanaan dan ada juga yang sudah dalam tahap penyelesaian. Di antara mega proyek tersebut, yaitu: *Center Point Of Indonesia* (CPI) Sulawesi selatan, Makassar akan memiliki kawasan super megah sebagai pusat bisnis, wisata dan pendidikan yang dinamakan *Center Point Of Indonesia* (CPI). Seiring dengan pembangunannya yang demikian megah tentunya tak lepas dari sebuah masalah dan kritikan yang terus menuai, mulai dari anggaran yang besar hingga pembebasan lahan yang kerap kali menjadi masalah utama. Hingga dalam

proses pembangunannya yang terus tersendak-sendak, kritikan terus menuai dari berbagai kalangan, bahkan ada yang menganggap sebagai komoditas politik dan jualan politik untuk kepentingan Pilkada Gubernur yang baru-baru dilaksanakan. Proyek monumental ini kemudian dipaksakan untuk selesai atau minimal terlihat berjalan pembangunannya agar tidak terlihat oleh masyarakat sebagai proyek gagal.

Sehingga menarik kemudian untuk dilakukan penelitian dengan menganalisis opini tokoh masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai *Center Point Of Indonesia* mengingat proyek yang dianggarkan dengan nilai triliunan inipun seolah hanya mimpi, dengan anggaran yang diperkirakan menelan 5,59 triliun tak kunjung mendapatkan investor dan hanya mengandalkan anggaran APBN dan APBD Pemerintah Sulawesi Selatan. Hal inilah yang menuai kritikan dengan memfokuskan pembangunan CPI maka tentu akan berdampak dengan pembangunan yang lainnya.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di Kota Makassar, dengan pertimbangan bahwa Kota Makassar adalah pintu gerbang untuk Indonesia Timur yang sedang melakukan kampanye besar-besaran dalam membangun *image* menuju kota dunia melalui megaprojek *Center Point of Indonesia (CPI)*.

Desain dan Variabel Penelitian

Tipe penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu memfokuskan pembahasan pada opini tokoh masyarakat terhadap kebijakan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadikan Kota Makassar sebagai *Center Point of Indonesia (CPI)*.

Dalam penelitian ini terdapat variabel yaitu:

variabel opini tokoh masyarakat dan variabel kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh tokoh masyarakat, yaitu Individu yang memiliki legitimasi atau pengakuan sosial dalam keberadaannya sebagai warga Kota Makassar. Pengambilan informan sebagai sampel penelitian menggunakan *sampling purposive*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2011:216). *Purposive sampling* diambil dengan maksud dan tujuan tertentu seseorang atau sesuatu yang diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap seseorang atau sesuatu itu memiliki informasi yang diperlukan untuk penelitiannya.

Sehingga diperoleh informan dalam kategori tokoh masyarakat dari berbagai level sosial yaitu: tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh agama, tokoh pemerintah, tokoh pendidikan, tokoh pengusaha, dan tokoh politik.

Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik pengumpulan data berupa : Wawancara (*Interview*) berupa wawancara dengan sejumlah informan yaitu tokoh masyarakat mengenai opini mereka terhadap kebijakan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang akan menjadikan Kota Makassar sebagai *Center Point of Indonesia (CPI)* dan observasi, yaitu mengumpulkan data di lapangan dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap informan dalam aktifitasnya. Menurut Sugiyono (2011:145), teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila informan yang diamati tidak terlalu besar.

Analisis Data

Data dalam penelitian ini menggunakan analisis data model komponensial (*componential analysis*) menurut Bungin (2009) teknik analisa data ini menggunakan “pendekatan kontras antarelemen”. Teknik ini digunakan untuk menganalisa unsur-unsur yang memiliki hubungan-hubungan yang kontras satu sama lain dalam domain-domain yang telah ditentukan untuk dianalisa secara lebih terperinci. Unsur-unsur atau elemen-elemen yang kontras akan dipilah dan selanjutnya dicari *term-term* yang dapat mewadahnya.

HASIL

Tabel 1 menunjukkan bahwa keseluruhan informan mengikuti isu seputar *Center Point of Indonesia* (CPI), informasi diperoleh melalui media massa berupa koran dan televisi juga media *online*. *Center Point of Indonesia* (CPI) adalah isu populer, namun sosialisasi kepada masyarakat bawah belum maksimal, sehingga belum mendapat dukungan penuh dari masyarakat.

Sebagian besar informan menyatakan bahwa Sulawesi Selatan khususnya Kota Makassar pantas dan perlu dijadikan sebagai *Center Point of Indonesia* (CPI) walaupun ada yang mengatakan bahwa indikasi politik menjadi motif atau hal-hal prinsipil yang menjadi dasar sehingga pemerintah perlu melakukan proyek ini. Namun pada umumnya didapatkan opini bahwa megaprojek ini dibangun demi kepentingan orang banyak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga menjadi cerminan Kawasan Timur Indonesia dan misi Kota Makassar menjadi kota dunia.

Secara financial, *Center Point of Indonesia* (CPI) adalah proyek prestisius bernilai triliunan rupiah, namun tidak menjadi masalah selama tidak menghambat sektor lain dan pemerintah harus menunjukkan transparansi anggaran kepada publik. Walaupun banyak yang menilai bahwa

anggaran pembangunan triliunan rupiah tersebut dianggap pemborosan. Begitu pula sebaliknya, bahwa proyek ini akan memberikan keuntungan dan pemasukan bagi kas pemerintah demi perbaikan pelayanan publik, membangun peluang investasi dan membuka lapangan kerja. Sedangkan dampaknya terhadap lingkungan, pembangunan CPI ini menyampingkan aspek-aspek ekologi dan berpotensi berpotensi mengganggu ekosistem yang ada.

PEMBAHASAN

Hennessy dalam Suprpto (2011:118-124) menyebutkan bahwa opini publik berkumpul di sekitar isu, opini publik terbangun jika adanya isu (*presence of an issue*). Termasuk di dalamnya adalah pembangunan *Center Point of Indonesia* (CPI) berupa reklamasi Pantai Losari Makassar. Selain itu ditunjukkan dengan hakikat masyarakat (*the nature of publics*). Harus ada kelompok orang yang dapat dikenal yang berkepentingan dengan persoalan tersebut. Ini adalah publik. Jadi setiap isu menciptakan publiknya sendiri dan setiap publik biasanya tidak terdiri atas individu-individu yang sama dengan yang membentuk publik tertentu lainnya, sekalipun setiap individu pada waktu tertentu merupakan anggota dari publik yang berlainan.

Cangara (2009:158), pendapat umum ialah gabungan pendapat perseorangan mengenai suatu isu yang dapat memengaruhi orang lain, serta memungkinkan seseorang dapat memengaruhi pendapat-pendapat tersebut. Ini berarti pendapat umum hanya bisa terbentuk kalau menjadi bahan pembicaraan umum, atau jika banyak orang penting (*elite*) mengemukakan pendapat mereka tentang isu sehingga bisa menimbulkan pro dan kontra di kalangan anggota masyarakat. Leonardo W Doob mendefenisikan opini publik adalah sikap orang-orang mengenai sesuatu hal, di mana mereka merupakan

anggota dari sebuah masyarakat yang sama. Dengan demikian opini publik itu berhubungan erat dengan sikap manusia yaitu sikap secara pribadi maupun sebagai anggota suatu kelompok. Sedang Cultip dan Center mengatakan *public opinion* adalah suatu kumpulan dari bermacam-macam hal yang saling bertentangan seperti berbagai pendapat, kepercayaan, dan prasangka. Senada dengan Cultip dan Center, adalah pendapat dari Redd H. Blake dan Edwin D. Haroldson yang merumuskan *public opinion* adalah kerangka pikiran yang sedang berpengaruh, berasal dari berbagai pendapat yang berbeda-beda dan dikemukakan secara terbuka oleh sekelompok orang tentang suatu *issue* yang menyangkut kepentingan umum (Suprpto, 2011:115-116).

Dan Nimmo (2006:10) mengemukakan bahwa opini ialah tindakan mengungkapkan apa yang dipercayai, dinilai, dan diharapkan seseorang dari objek-objek dan situasi tertentu. Dengan demikian opini publik adalah pendapat khalayak terhadap sesuatu objek atau situasi tertentu yang dipercayai, dinilai baik dan benar atau diharapkan. Tindakan tersebut bisa merupakan pemberian suara, pernyataan verbal, dokumen tertulis atau bahkan diam; singkatnya, tindakan apapun yang bermakna adalah ungkapan opini. Dengan kata lain, seseorang yang mengungkapkan opininya menunjukkan makna yang diberikan oleh orang itu kepada hal-hal yang bersangkutan. Menurut Piliang (2005:407), opini publik yang pada hakikatnya adalah opini bentukan publik secara kolektif, yang dibangun di dalam sebuah ruang debat publik yang terbuka, yang di dalamnya dikembangkan argumen-argumen yang rasional, kini menjadi opini publik yang dikonstruksi di dalam media oleh elit-elit tertentu yang berkepentingan: kepentingan kekuasaan (elit politik), kepentingan mencari keuntungan (elit kapitalis), kepentingan mencari popularitas (elit budaya massa).

Penentuan informan dalam penelitian ini yang berasal dari beberapa tokoh masyarakat yaitu tokoh pendidikan, pemuda, perempuan, pengusaha, politik dan tokoh agama. Seperti apa yang dikatakan Jackson Baur (dalam Cangara, 2009:166-167), seorang pakar pendapat umum berkebangsaan Amerika, mengemukakan bahwa proses pembentukan pendapat dapat dipahami dari proses terbentuknya pendapat seseorang, salah satunya adalah karena faktor sosial yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat memberi banyak pengaruh pada sikap atau pendapatnya.

Menurut Hendrawan, pemuka pendapat adalah sumber informasi. Masyarakat yang sedang membangun berkepentingan akan inovasi (penemuan-penemuan baru), baik berupa gagasan-gagasan, tindakan ataupun benda-benda baru. Pemuka pendapat akan menentukan apakah inovasi tentang sesuatu itu akhirnya akan diterima atau ditolak oleh masyarakat. Pemuka pendapat (komunikator) harus menguasai antara lain, memiliki terpaan yang tinggi dan memiliki kemampuan teknik-teknik komunikasi yang tepat, serta memiliki kredibilitas sebagai sumber informasi yang dapat menjadikan sebagai tempat bertanya yang akan menjadi pegangan khalayaknya untuk hal-hal yg kurang dimengerti atau kurang jelas.

Ada dua pengelompokan pemuka pendapat berdasarkan aktif tidaknya dalam perilaku. Pertama, pemuka pendapat aktif (*opinion giving*). Pemuka pendapat disebut aktif jika ia aktif mencari penerima atau *followers* untuk mengumumkan atau mensosialisasikan sesuatu informasi. Di mana seseorang mencari informasi dan meneruskannya kepada masyarakat. Ini sangat baik, kerana tingkat kepercayaan kepadanya sangat tinggi, mengingat banyak masyarakat yang belum memahami suatu permasalahan. Kelebihan dengan cara ini adalah tingkat kepercayaan terhadap pemuka pendapat sudah terbangun terlebih dahulu.

Kedua, pemuka pendapat pasif (*opinion seeking*). Artinya pemuka pendapat dicari oleh *followers*-nya. Dalam hal ini *followers* aktif mencari sumber informasi kepada pemuka pendapat sehubungan dengan permasalahan yang dihadapi. Jika *followers* yang aktif maka dikategorikan sebagai *opinion seeking*, sedangkan jika pemuka pendapatnya yang aktif disebut sebagai *opinion giving* (Nurudin, 2004:155).

Selain pembuat kebijakan resmi, terdapat pula peserta lain yang terlibat dalam proses kebijakan yang meliputi diantaranya kelompok kepentingan, partai politik, organisasi penelitian, media komunikasi, serta individu masyarakat. Mereka ini yang disebut oleh Anderson sebagai peserta non pemerintahan (*nongovernmental participants*) atau aktor tidak resmi, karena penting atau dominannya peran mereka dalam sejumlah situasi kebijakan tetapi mereka tidak memiliki kewenangan legal untuk membuat kebijakan yang mengikat. Peranan mereka biasanya adalah dalam menyediakan informasi, memberikan tekanan, serta mencoba untuk mempengaruhi (Anderson, 2006:57-67). Mereka juga dapat menawarkan proposal kebijakan yang telah mereka siapkan. Untuk memahaminya perlu memahami pula sifat-sifat semua pemeran serta (*participants*), bagian atau peran apa yang mereka lakukan, wewenang atau bentuk kekuasaan yang mereka miliki, dan bagaimana mereka saling berhubungan serta saling mengawasi.

Berbagai argumentasi menggambarkan sikap pro dan kontra terhadap pembangunan *Center Point of Indonesia* (CPI), namun ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan publik sebagai salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik, sering bertentangan dengan yang diharapkan, bahkan menjadikan produk kebijakan itu sebagai menjadi batu sandungan bagi pembuat kebijakan itu sendiri. Itulah sebabnya implementasi kebijakan publik, diperlukan

pemahaman yang mendalam tentang studi kebijakan publik, yang menurut Djadja Saefullah dalam Tachjan (2006:ix) bahwa studi kebijakan publik tersebut dapat dipahami dari dua perspektif, yakni:

Pertama, perspektif politik, bahwa kebijakan publik di dalamnya perumusan, implementasi, maupun evaluasinya pada hakekatnya merupakan pertarungan berbagai kepentingan publik di dalam mengalokasikan dan mengelola sumber daya (*resources*) sesuai dengan visi, harapan dan prioritas yang ingin diwujudkan. Kedua, perspektif administratif, bahwa kebijakan publik merupakan ikhwal berkaitan dengan sistem, prosedur, dan mekanisme, serta kemampuan para pejabat public (*official officers*) di dalam menterjemahkan dan menerapkan kebijakan publik, sehingga visi dan harapan yang diinginkan dicapai dapat diwujudkan di dalam realitas. Memahami kebijakan publik dari kedua perspektif tersebut secara berimbang dan menyeluruh akan membantu kita lebih mengerti dan maklum mengapa suatu kebijakan publik tersebut meski telah dirumuskan dengan baik namun dalam implementasinya sulit terwujud.

Sehubungan dengan itu Nugroho (2006:119) mengartikan implementasi sebagai upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Hal ini sejalan dengan pandangan Salusu (2005:409) yang mengartikan implementasi sebagai operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai suatu sasaran tertentu dan menyentuh seluruh jajaran manajemen mulai dari manajemen puncak sampai pada karyawan terbawah. Berkaitan dengan faktor sumber daya manusia yang mempengaruhi proses implementasi suatu kebijakan, Mazmanian dan Sabatier (Subarsono, 2006) membuat kategorisasi bahwa implementasi kebijakan dipahami melalui tiga perspektif yang berbeda, yaitu pembuat kebijakan, pejabat pelaksana di lapangan dan aktor individu selaku

kelompok target.

Van Horn (Wahab, 2007) mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan. *Center Point of Indonesia* (CPI) membantu dalam kelancaran aktifitas masyarakat dan berdampak positif terhadap perekonomian. Memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat misalnya: masalah kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, dan pelayanan publik yang buruk; memanfaatkan peluang baru bagi kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat seperti mendorong investasi, inovasi, dan pelayanan publik.

Namun ditemukan argumentasi yang berbeda bahwa mitigasi Pantai Losari bukan hanya mengalihfungsi areal resapan menjadi area komersil, tetapi juga kemudian menimbulkan masalah sosial, karena fungsi sosial sebagai area publik perlahan-lahan dihilangkan mengikuti kemauan investor. Pembangunan CPI menuai sorotan karena megaprojek ini akan secara ekstrim mengubah fungsi-fungsi ekologis di sepanjang pantai Makassar. Inilah yang disebut Dunn (1998:291-292) sebagai teori peramalan (*forecasting*), yaitu suatu prosedur untuk membuat informasi faktual tentang situasi sosial masa depan atas dasar informasi yang telah ada tentang masalah kebijakan.

KESIMPULAN

Opini tokoh masyarakat terhadap kebijakan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam membangun *Centre Point of Indonesia* (CPI) menunjukkan bahwa: CPI merupakan suatu *issue* yang menyangkut kepentingan umum dengan demikian memunculkan berbagai opini masyarakat sehingga mega proyek ini tidak lepas dari pro kontra dari segi ekonomi dan lingkungan. Banyak yang

menilai bahwa secara finansial, anggaran pembangunan triliunan rupiah dianggap pemborosan. Begitu pula sebaliknya, bahwa proyek ini akan memberikan keuntungan dan pemasukan bagi kas pemerintah demi perbaikan pelayanan publik, membangun peluang investasi dan membuka lapangan kerja. Sedangkan dampaknya terhadap lingkungan, pembangunan CPI ini menyampingkan aspek-aspek ekologi dan berpotensi mengganggu ekosistem yang ada.

Kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam membangun *Centre Point of Indonesia* (CPI) menunjukkan bahwa konsepsi *Center Point Of Indonesia* berawal dari satu keinginan bagaimana memulai dan menciptakan satu peradaban baru yang tidak hanya bermanfaat untuk masa sekarang tetapi juga untuk kemaslahatan dan kesejahteraan generasi mendatang. Konsep ini tidak lepas dari pendefinisian tentang kebijakan publik berupa semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur, inovasi, dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah.

DAFTAR RUJUKAN

- Anderson, James E. (2006). *Public Policy Making: An Introduction*. Houghton Mifflin. Boston.
- Bungin, Burhan. (2009). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Prenada Media. Jakarta.
- Cangara, Hafied. (2009). *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Dunn, William. (1998). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Terjemahan Samudra Wibawa, Agus Herwanto Hadna, Erwan, Agus purwanto*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

- Nimmo, Dan. (2004). *Kominikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media*. Terjemahan oleh Tjun Surjaman. Rosdakarya. Bandung.
- (2006). *Kominikasi Politik: Khalayak dan Efek*. Terjemahan oleh Tjun Surjaman. Rosdakarya. Bandung.
- Nugroho, D Riant. (2006). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Nuruddin. (2004). *Sistem Komunikasi Indonesia*. Raja Grapindo Persada. Jakarta.
- Salusu, Jonathan. (2005). *Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*. Grasindo. Jakarta.
- Subarsono. (2006). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta. Bandung.
- (2011). *Statistika untuk Penelitian*. Alfabeta: Bandung.
- Suprpto, Tommy. (2011). *Komunikasi Propaganda*. CAPS. Yogyakarta.
- Tachjan, (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Penerbit AIPI Bandung- Puslit KP2W Lemlit UNPAD. Bandung.
- Piliang, Yasraf A. (2005). *Transpolitika: Dinamika Politik di dalam Era Virtualitas*. Jalasutra. Yogyakarta.
- Wahab, Abdul Solichin. (2007). *Analisis Kebijakanaksanaan, Dari Formulasi Keimplementasi Kebijakanaksanaan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.